



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **INDRARTO WIDYATMOKO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **212743**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **1.645.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/99 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 164 m2/70 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/36 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/36 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 221 m2/35 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 879 m2/60 m2 di WONOGIRI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 175.000.000
7. Tanah Seluas 133 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/45 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **232.500.000**

1. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	88.000.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	560.929.997
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.526.429.997
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.526.429.997

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.